

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KETIADAAN
AKAD TERTULIS DALAM SENGKETA PEMBAYARAN
(Studi Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PN.Kpn di Pengadilan Negeri
Kepanjen, Malang.)**

SKRIPSI

**Oleh
Achmad Baihaqi Machsani
NIM : 05010222001**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Baihaqi Machsani
NIM : 05010222001
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KETIADAAN AKAD TERTULIS DALAM SENGKETA PEMBAYARAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 133/PDT.G/2025/PN.KPN DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN, MALANG.)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 Februari 2026

Yang menyatakan,



Achmad Baihaqi Machsani
NIM. 05010222001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Baihaqi Machsan

NIM : 05010222001

Judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KETIADAAN
AKAD TERTULIS DALAM SENGKETA PEMBAYARAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 133/PDT.G/2025/PN.KPN DI PENGADILAN
NEGERI KEPANJEN, MALANG.)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 11 Februari 2026

Pembimbing,



Prof. Dr. Idri, M.Ag.

NIP. 196701021992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Baihaqi Machsani

NIM. : 05010222001

Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ketiadaan Akad Tertulis dalam Sengketa Pembayaran (Studi Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/Pn.Kpn Di Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang.)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2026 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. H. Idri, M.Ag.
NIP. 196701021992031001

Penguji II

Dr. Ahmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III

Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP. 197307262005011001

Penguji IV

Nurika Falah Ilmania, S.H., M.H.
NIP. 200005032025052009

Surabaya, 02 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Shafiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Baihaqi Machsani
NIM : 05010222001
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : baihaqimachsani1927@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KETIADAAN AKAD TERTULIS DALAM SENGKETA PEMBAYARAN (Studi Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PN.Kpn di Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang.)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 April 2026

Penulis



(Achmad Baihaqi Machsani)

ABSTRAK

Praktik transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tempo merupakan salah satu bentuk hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya transaksi tersebut masih sering tidak disertai dengan perjanjian secara tertulis melainkan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Seperti dalam Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PN.Kpn, Majelis Hakim menyatakan gugatan wanprestasi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan alasan tidak adanya perjanjian tertulis sebagai dasar hubungan hukum para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis ketiadaan akad tertulis dalam sengketa pembayaran dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap salinan Putusan Pengadilan Negeri Kapanren Nomor 133/Pdt.G/2025/PN Kpn, peraturan perundang-undangan, KHES, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta literatur yang membahas hukum Islam dan hukum positif terkait syarat sah perjanjian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima didasarkan pada penerapan hukum acara perdata, khususnya terkait pemenuhan syarat formil pembuktian. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, ketiadaan akad tertulis tidak serta-merta meniadakan keabsahan akad, sepanjang rukun dan syarat akad telah terpenuhi, bahwa di dalam Pasal 20 ayat (1) KHES mendefinisikan akad sebagai kesepakatan antar dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 21 KHES secara tegas menyatakan bahwa akad dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui perbuatan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, disarankan Majelis Hakim dalam menangani perkara wanprestasi tidak hanya menitikberatkan pada aspek formil berupa perjanjian tertulis, bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata yang berisi tentang syarat sah perjanjian bahwa perjanjian itu tidak mengharuskan dibuat secara tertulis selama syarat-syarat tersebut terpenuhi maka perjanjian tersebut telah sah secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan materiil dan fakta yang menunjukkan adanya hubungan hukum para pihak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Landasan Teori.....	11
H. Definisi Operasional	13
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II AKAD SYARIAH, PEMBUKTIAN, WANPRESTASI DAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD.....	23
A. Pengertian Akad	23
B. Pembuktian dalam Hukum Islam dan Kedudukan <i>Iqrār</i>	28
C. Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata dan Syariah	30
D. Putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> dalam Hukum Acara Perdata.....	34
BAB III PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (<i>NIET ONTVANKELIJK</i>	

VERKLAARD) DALAM PUTUSAN NOMOR 133/PDT.G/2025/PN.KPN DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN, MALANG	37
A. Kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang	37
B. Deskripsi Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PN.Kpn	38
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM	54
A. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i>) Karena Tidak Adanya Perjanjian Tertulis	54
B. Ketiadaan Akad Tertulis dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	55
C. Penilaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i>	60
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	70

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A. Ariani Hidayat, dan Nur Indah. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah). Buku. *Digital Library Badan Wakaf Indonesia*, Januari 19, 2021.

Hehanussa, Deassy J. A., Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro, Rospita Adelina Siregar, Christina Bagenda, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. CV Widina Media Utama, 2023.

Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Prilia Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.

Surah Ali 'Imran Ayat 7.

Surah Al-Baqarah ayat 282.

Jurnal/Skripsi/Tesis

Akriam, Muhammad Annur Apriansyah Rangga, and Qadri Maulana Islami Syafri. "Kaidah Pembuktian dalam Arbitrase Syariah: Analisis Yuridis dan Prinsip Bayyinah dalam Fiqih Muamalah." *Inomatec: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer* 1, no. 03 (Januari 2026).

Alam, Azhar, Dewi Sari, and Boby Habibi. "Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (April 2020).

Alilia, Valentina Wahyu, Dian Dwi Cahyani, Salsabila Fitri Ananda Santosa, Mufaida Shofia Arifah, and Waluyo. "Tanggung Jawab Mudharib Terhadap Kerugian Dalam Mudharabah Persefektif Fiqh Muamalah." *Jisef: Journal Of International Sharia Economics and Financial* 4, no. 01 (Mei 2025).

Amalia, Feby Ayu. "Hukum Akad Syariah." *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 01 (Juni 2022).

Bariyah, Siti Izzatul. "Mitigasi Wanprestasi Nasabah Pembiayaan Murabahah Melalui Mekanisme Ta'zir Dan Tawidh (Studi Kasus Bsi Kcp Surabaya Uinsa)." *Muslim Heritage* 9, no. 1 (Juli 2024).

- Djafri, Muhammad Taufan, Asri Asri, dan Ihsan Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Di Peradilan: Islamic Legal Review of Audio Recordings as Evidence of Criminal Acts in Court Proceedings." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 3 (Mei 2024).
- Ertanti, Indriana, dan Mahfud Fahrazi. "Praktik Ijab-Kabul (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam." *Diversi : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (Desember 2022).
- Fazriah, Dina. "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (Juli 2023).
- Handriani, Aan, dan Edy Mulyanto. "Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis dalam Bertransaksi." *Pamulang Law Review* 4, no. 1 (Agustus 2021).
- Hibatullah, Muhammad Fahmi. "Akibat Hukum Wanprestasi Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata." *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (April 2024).
- Kurnaliah and Aminah. "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang (Studi Putusan MA No. 04/PDT.G/2017/PN.Btg)." *Notarius* Volume 17 Nomor 3 (2024).
- M. Afif. "Pembatalan Perjanjian Pengikatan Hutang Dikarenakan Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Suatu Perjanjian h Agung Republik Indonesia Nomor 326 K/Pdt/2023)." Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.
- M. Sayid Azhari. "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pdt. G/2021/PN. Soe)." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2024.
- Muh Dian Nur Alim Mumin, Kurniadi, and A. M. Atma. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (Januari 2024).
- Muhammad, Firmansyah. "Penerapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Tulungagung No. 1573/Pdt.G/2024/PA.TA)." *Journal of Islamic Business Law* 9, no. 4 (Desember 2025).

- Mulazid, Ade Sofyan. "Mekanisme Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Pandangan Islam." *DINAR Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (Juni 2022).
- Munandir, Rahman, and Syufaat Syufaat. "Kritik Maqashid Syariah Terhadap Penyelesaian Nasabah Wanprestasi Pada Perbankan Syariah." *Alhamra Jurnal Studi Islam*, Juni 15, 2023.
- Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Putusan. *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (Mei 2024).
- Noviantari, Ayu. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Lisan Hutang Piutang Atas Dasar Kepercayaan Dengan Sistem Pembuktian Elektronik (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk)*. n.d.
- Puspitaningrat, I. Dewa Agung Ayu Mas, Putu Chandra Kinandana Kayuan, and I. Made Artha Rimbawa. "Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Putusan." *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (Mei 2024).
- Putri, Najma Kusumawardhani Mustika, Nur Hasanah, Putri Maharani, and Siti Mastutik. "Tinjauan Hukum Terhadap Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (No) Tentang Sengketa Tanah Menurut Hukum Acara Perdata." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 1, no. 4 (Oktober 2024).
- Rachman, Abdul. "Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (Februari 2022).
- Rahmadani, Gema, Muhammad Faisal Hamdani, and Nawir Yuslem. "Alat Bukti Yang Paling Kuat Dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama." *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 5, no. 2 (November 2023).
- Rajib, Muh. "Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun Dan Syarat Akad." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. 3 (Februari 2025).
- Romli, Muhammad. *Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata*. no. 2 (2021).
- Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata*. Vol 16, no. 2 (2021).
- Salmiati. "Implementasi Ba'i Muajjal Pada Jual Beli Pupuk Pertanian (Studi Pada Kelompok Tani Corohali Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai)".

- Sanjaya, Muhammad Iqbal. "Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis)." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (Oktober 2022).
- Shofiatul Jannah, Hidayatullah Abduurrahman, Solihah Sari Rahayu, Nuhbatul Basyariah, Syamhudian Noor, Mohamad Shabirin Shaddiq, Selamat Riadi, dkk. "Fiqh Muamalah." *Lingkar Edukasi Indonesia*, Mei 2025.
- Sidik, Parid. "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (Mei 2023).
- Sukadana, Dewa Ayu Putri. "Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik." *Jurnal Rechtens* 14, no. 1 (Juni 2025).
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (Desember 2021).
- Taufiq, M. "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (November 2021).
- Wardani, Rila Puspita, Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Moh Alfaris, and Erwin Widhiandono. "Analisis Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Pada Akta Jual Beli." *Risalah Hukum* 20, no. 1 (Juni 2024).
- Wirakusuma, Anggi, Amanda Syafani Al Ikhsan Hasibuan, Adhitya Aldhani Wijaya, Muhammad Yasir Azhar, dan Muhammad Asdon Munthe. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Properti Komersial Berdasarkan KUHPerdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Aksioma: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 2 (Februari 2025).
- Yusram, Muhammad. "Kaidah Fikih al-Yaqī n Lā Yazū l bi al-Syak dan Realisasinya terhadap Tangkapan Layar Ponsel sebagai Alat Bukti Pengadilan." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 4, no. 5 (2025).

Peraturan Perundang-Undangan

- Mahkamah Agung RI. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013.
- Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Kitab Undang-Undang Perdata.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan

Salinan Putusan Nomor 133/Pdt.G/2025/PN Kpn.

Salinan Putusan Nomor 40 Pdt G 2025 PN Cjr.

Data Elektronik

HR. Bukhori dan Muslim.

JDIH Mahkamah Agung RI.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A